

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM (KSP) ASA MANDIRI DI KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :
KURNIAWATI
C100150189**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
ASA MANDIRI DI KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KURNIAWATI

C100150189

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
ASA MANDIRI DI KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI**

**OLEH
KURNIAWATI
C100150189**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 13 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK.537/NIDN.072780503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juli 2019

Penulis



KURNIAWATI

C1001502189

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
ASA MANDIRI DI KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI**

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal simpan pinjam dan bertujuan untuk membantu keperluan pinjam meminjam anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah, dan mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian ini bersifat normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian pinjam meminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi (Asa Mandiri) terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang diberikan koperasi. Kemudian terjadilah kesepakatan pada saat kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian yang dibuat oleh koperasi. Setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian, maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan tersebut bisa didasarkan karena Wanprestasi atau karena Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci: perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum

Abstract

Savings and Loans Cooperatives are cooperatives whose members consist of people who have a direct interest in the matter of savings and loans and aim to help members borrow and borrow. This study aims to know the process of implementing lending and borrowing agreements, regulations and rights and obligations between cooperatives and customers, and knowing legal liability if one party defaults. This research method is normative because in this study to be studied are legal rules, legal principles and legal responsibility for the implementation of cooperative lending agreements. The nature of this research is descriptive which describes thoroughly and systematically about lending and borrowing agreements. The results of the study show that the agreement to borrow and borrow money in a cooperative Asa Mandiri must first fulfill the administrative requirements and legal requirements provided by the cooperative. Then there was agreement when the two parties signed an agreement made by the cooperative. After an agreement and signing of an agreement, rights and obligations arise from the parties that must be carried out. Legal responsibility arises because of an error made by one of the parties who made the agreement. This error can be based on Default or because of Unlawful Actions.

Keywords: loan agreements, rights and obligations, legal responsibilities

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Pramono, 1986). Koperasi menjadi alternatif bagi masyarakat karena koperasi Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi yang sering ditemukan di daerah perdesaan maupun perkotaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam (Hadhikusuma, 2000). Barang yang menghabiskan karena pemakaian misalnya uang, dalam melakukan pinjam meminjam uang di koperasi. Diperlukan adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang diawali dengan membuat kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan uang (kreditur) yang dalam hal ini adalah pihak koperasi. Perjanjian tersebut memuat aturan-aturan mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2002).

Adanya kesepakatan pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang bertindak sebagai Kreditur dengan anggota koperasi atau masyarakat yang bertindak sebagai debitur, maka lahirlah perjanjian pinjam meminjam yang mengikat. Dari perjanjian pinjam meminjam tersebut muncullah hubungan hukum yaitu hubungan per”utang”an dimana ada kewajiban berprestasi dari pihak yang meminjam dan ada hak mendapatkan prestasi bagi pihak yang meminjamkan (Salim, 2004). Hubungan hukum tersebut akan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat.

Namun didalam kenyataannya, dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak selamanya akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya

salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan atau disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak atau melakukan wanprestasi dan jika salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan maka ia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali? (3) Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, (2) Mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, (3) Mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, (2) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat tentang kegiatan pinjam meminjam dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten

Boyolali, (3) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, karena penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggung jawab hukum tentang pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan Untuk mencari data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum penelitian dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dan akta perjanjian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi pertauran perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam (KSP) asa mandiri di kecamatan Ampel kabupaten Boyolali

Pada proses perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri, terdapat beberapa tahap, antara lain :

3.1.1 Sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang

Sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang, debitur harus memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu batas usia nasabah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat kredit

berakhir dengan kriteria memiliki usaha atau pekerjaan tetap, sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya, debitur mengisi formulir Surat Permohonan Pinjaman atau Surat Permohonan Kredit yang telah disediakan oleh Koperasi. Debitur wajib mengisi data yang ada pada surat tersebut berupa identitas debitur, jumlah pengajuan permohonan pinjaman uang kepada koperasi, jangka waktu pengembalian pinjaman uang, jenis jaminan yang akan diserahkan, dan kepentingan atau keperluan pinjaman uang tersebut oleh debitur. Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri dapat berupa Bukti Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik Rumah.

Kemudian setelah debitur mengisi formulir dengan persyaratan yang tertera sekaligus melengkapi berkas, serta dilakukannya pengecekan atau suvey jaminan dan disetujui oleh pihak Koperasi, maka Surat Permohonan Pinjaman atau Surat Permohonan Kredit tersebut dapat di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan pinjaman uang dapat cairkan 1 (satu) hari kerja setelah pengecekan terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur.

3.1.2 Pada Saat Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pihak koperasi menyediakan akta perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dibuat oleh pihak koperasi. Akta perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh pihak debitur, dibacakan terlebih dahulu oleh pihak koperasi sampai pihak debitur memahami dan menyetujui seluruhnya dan bersedia mematuhi peraturan serta konsekuensinya. Setelah debitur dibacakan akta tersebut dan mengerti terjadilah penandatanganan perjanjian oleh pihak koperasi dan debitur.

Setelah penandatanganan terjadi debitur memberikan jaminan kepada pihak koperasi yang disetujui dalam perjanjian. Dan pihak koperasi menyerahkan uang sesuai nominal dalam perjanjian kepada debitur.

3.1.3 Setelah Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Setelah kesepakatan dan penandatanganan antara pihak koperasi dengan pihak debitur yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan pinjam meminjam uang maka mereka memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dimana kewajiban pihak

koperasi yaitu menyediakan pinjaman dan memberikan pinjaman uang sesuai dengan kesepakatan kepada debitur, dan kewajiban debitur yaitu mendapatkan pinjaman uang dari koperasi serta melunasi atau mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunga dan jasanya, dan para pihak harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

3.2 Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam asa mandiri di kecamatan Ampel kabupaten Boyolali

Peraturan yang menjadi dasar atau patokan oleh Koperasi Simpan Pinjam yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu peraturan atau ketentuan yang terdapat di akta perjanjian adalah klausula baku yang dibuat oleh pihak koperasi, berlaku bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri.

Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur antara lain : (1) Menerima pelunasan pinjaman uang yang dipinjam oleh debitur dengan tepat waktu, (2) Mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sesuai yang diperjanjikan, (3) Menerima jaminan berupa surat kepemilikan atau barang yang dijaminkan dan mempunyai kuasa penuh atas jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi untuk diambil atau dijual, (4) Melakukan penagihan kepada debitur apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, (5) Pihak koperasi berhak meminta kekurangan pembayaran kepada debitur apabila terjadi pelanggaran barang jaminan dan belum mencukupi pelunasan.

Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak koperasi adalah menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada peminjam uang atau debitur setelah penandatanganan terjadi.

Sedangkan hak dari peminjam uang selaku debitur antara lain : (1) Menerima pinjaman uang dari pihak koperasi, (2) Mendapatkan pelayanan serta pengarahan dari pihak koperasi, (3) Mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang jaminan yang diserahkan kepada Koperasi apabila debitur telah melunasi semua kewajibannya.

Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan peminjam uang selaku debitur antara lain : (1) Menyerahkan dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan pinjaman uang di Koperasi Asa Mandiri, (2) Mentaati semua peraturan pinjaman uang yang terdapat dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, (3) Melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu, (4) Menyerahkan surat kepemilikan atas barang jaminan kepada koperasi sesuai yang diperjanjikan, (5) Menjaga barang jaminan dan tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain, (6) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, wajib membayar denda keterlambatan perbulan 2% dari sisa pokok pinjaman, (7) Menyerahkan barang jaminan sepenuhnya apabila debitur melakukan wanprestasi dan sudah mendapatkan peringatan, (8) Menanggung segala beban pajak, premi asuransi, biaya administrasi dan ongkos lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini bila ada.

3.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam asa mandiri di kecamatan Ampel kabupaten Boyolali

3.3.1 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena adanya wanprestasi

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kesalahan, kesalahan karena adanya wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang tercantum dalam perjanjian. Wanprestasi disini adalah melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya sesuai dalam perjanjian.

Pihak debitur dikatakan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disanggupi padahal debitur sudah menyetujui pada awal perjanjian dan sudah menandatangani isi perjanjiannya. Maka dengan demikian debitur harus bertanggung jawab menurut hukum yaitu mengganti kerugian, penggantian rugi tersebut berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Kesalahan yang dilakukan oleh koperasi sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu pihak kreditur tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pihak debitur pihak koperasi atau kreditur dengan sengaja menaikkan suku bunga yang telah disepakati membuat debitur keberatan membayar

angsuran yang berakibat debitur keberatan untuk membayar angsuran karena angsurannya jumlahnya terlalu banyak. Hal itu bisa dikatakan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi apabila debitur atau kreditur melakukan wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata maka debitur atau kreditur harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

3.3.2 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena adanya perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kesalahan, kesalahan perbuatan melawan hukum berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan yang dilarang dalam perjanjian dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak koperasi, yaitu apabila pengurus sengaja menggadaikan atau mengalihkan BPKP atau sertifikat hak milik atas tanah demi kepentingannya sendiri dan mengakibatkan debitur tidak bisa menerima kembali surat kepemilikan atas barang jaminan yang sudah melakukan pelunasan, maka debitur dapat meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak koperasi. Dengan demikian pihak kreditur harus bertanggung jawab menurut hukum yaitu mengganti semua kerugian kepada debitur.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak debitur, contohnya apabila debitur menjual barang jaminan yang ada padanya kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian koperasi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap barang jaminan apabila debitur wanprestasi. Sehingga, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu adanya perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi kreditur, debitur harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan tersebut dengan mengembalikan barang jaminan yang akan di eksekusi. Apabila hal

tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan atau debitur tidak bisa mengembalikan jaminan barang, maka pihak koperasi dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk itu.

4. PENUTUP

Pertama, proses perjanjian pinjam meminjam uang dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, Sebelum Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Yaitu debitur harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tahap kedua, Pada Saat Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pihak koperasi menyediakan akta perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dibuat oleh pihak koperasi. Akta perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh pihak debitur, dibacakan terlebih dahulu oleh pihak koperasi. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian maka sejak saat itu perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan. Tahap ketiga, Setelah Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, yaitu Setelah kesepakatan dan penandatanganan antara pihak koperasi dengan pihak debitur yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan pinjam meminjam uang maka mereka memiliki hubungan hukum yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dimana kewajiban pihak koperasi yaitu menyediakan pinjaman dan memberikan pinjaman uang sesuai dengan kesepakatan kepada debitur, dan kewajiban debitur yaitu mendapatkan pinjaman uang dari koperasi serta melunasi atau mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunga dan jasanya, dan para pihak harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kedua, Peraturan yang menjadi dasar atau patokan oleh Koperasi Simpan Pinjam yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu peraturan atau ketentuan yang terdapat di akta perjanjian adalah klausula baku yang dibuat oleh pihak koperasi, berlaku bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri. Adanya kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara timbal balik antara koperasi atau kreditur dengan peminjam

atau debitur. Kewajiban utama koperasi adalah menyediakan pinjaman uang untuk debitur sesuai dengan perjanjian, sedangkan kewajiban utama debitur yaitu berkewajiban melunasi seluruh pinjamannya termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Ketiga, pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi harus mengganti kerugian sesuai dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang (debitur) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi, pihak kreditur atau pihak debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan mengganti kerugian.

Diharapkan bagi pihak koperasi dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang lebih tegas untuk melakukan penilaian terhadap anggota yang mengajukan pinjaman. Pihak koperasi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, untuk mencegah adanya anggota yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum selama perjanjian pinjam meminjam uang berlangsung.

Diharapkan bagi pihak peminjam bagi peminjam atau debitur yang akan melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebaiknya meminta dibacakan dan penjelasan mengenai akta perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh koperasi agar debitur memahami dan mengerti dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur. Diharapkan pula debitur mempunyai itikad baik untuk mentaati peraturan yang telah disepakati sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

Diharapkan untuk masyarakat umum menggunakan jasa koperasi karena mengedepankan musyawarah dan syaratnya tidak terlalu sulit seperti bank. Apabila memang perlu meminjam uang kepada koperasi, sebaiknya bisa menilai kemampuan

diri sendiri untuk memperhitungkan kemampuan mampu atau tidak membayar angsuran agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

H.S, Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Pramono, Nindyo. (1986). *Berberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta: TPK Gunung Mulia

Subekti. (2000). *Hukum Perjanjian*. JAKARTA : Intermasa

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Untung, H. Budi. (2000). *Hukum Koperasi & Peran Notaris Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta